



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN



Tujuan :

1. **Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Trensparan dan Akuntabel**

Sasaran :

1. **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan BKAD**
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah**
3. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Aset Daerah**
4. **Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah**

Disusun oleh :

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan

Alamat : Jln. Achmad Yani, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah

Telp/Fax : (0536) 4043611

[https : www.bkad.katingankab.go.id](https://www.bkad.katingankab.go.id) email.bkad@katingankab.go.id

KASONGAN 74411

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul *“Rencana Strategis (Renstra) 2024 - 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan”*.

Renstra ini merupakan Rencana Strategis yang dibuat dalam mengakomodir program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun kedepan mengalami revisi sesuai dengan nomenklatur OPD.

Secara garis besar Rencana Strategis ini mengupas tentang Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan.

Dengan segala keterbatasan, Rencana Strategis ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu per satu disini. Selanjutnya terima kasih dan penghargaan yang sepatutnya disampaikan kepada Bupati Katingan yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada diri kami untuk memimpin Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih belum sepenuhnya sempurna, tetapi kami meyakini juga bahwa Rencana Strategis ini telah menggambarkan tentang kebijakan, program dan Kegiatan yang kami susun untuk mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati, semoga bermanfaat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan,

TOTO JAYA, S.Pi
Pembina

NIP. 19720229 200604 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, dengan demikian sebagai konsekuensi logis Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan kondisi Pemerintahan yang Baik (Good Government) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) melalui transparansi dari semua sektor Pemerintahan.

Salah satu langkah tindakan nyata adalah Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi dengan Eselon II keatas untuk menyusun Perencanaan Strategik (Renstra) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam.

Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, yang dituangkan dalam program kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Tugas Pokok dan fungsinya masing-masing.

Renstra ini secara sistematis menggambarkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain, tujuan organisasi bisa saja dalam kurun waktu yang relatif lama tidak berubah, tetapi yang selalu berubah adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya Renstra ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Demikian Renstra ini dibuat, dengan segala kerendahan kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan untuk itu kritik dan saran serta Informasi / komunikasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan 7

2.2 Sumber Daya yang Dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan 10

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan 12

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 27

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan 27

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 31

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPD 34

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 36

4.1 Tujuan 36

4.2 Sasaran 36



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Katingan 39

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 41

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 41

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 59

BAB VIII PENUTUP 60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan selain sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bertindak sebagai penyelenggara dan koordinator seluruh usaha Bidang Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

Dalam kaitan pelaksanaan Kinerja OPD, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan melaksanakan program/kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. Sedangkan dalam kaitan Kinerja OPD, pelaksanaan kegiatan kerjanya melekat pada tugas dan fungsi Kepala Dinas.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berfungsi sebagai kerangka acuan untuk penyusunan rencana anggaran pembiayaan penyelenggaraan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang dijabarkan melalui penyusunan program/kegiatan oleh setiap OPD yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan.

Proses dan tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapan Penyusunan
- 2) Penyusunan Rancangan Awal
- 3) Penyusunan Rancangan
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 5) Perumusan Rancangan Akhir
- 6) Penetapan Renstra PD

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tahun 2024 - 2026 ini, merupakan implementasi dari salah satu tujuan Pemerintah Kabupaten Katingan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan pendapatan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Sebagai tahapan realistis untuk memberikan arah kinerja lima tahun ke depan, dilakukan



penyusunan kegiatan berdasarkan program kerja pembangunan yang telah ditetapkan untuk dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan disusun berlandaskan pada :

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- c. Landasan Operasional : Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan rencana strategis perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yaitu :
 - 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 - 2025 Kabupaten Katingan;
- 19) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014 - 2018 Kabupaten Katingan;

- 20) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35).
- 21) Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan merupakan “guideline” dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Katingan dari tahun 2024 - 2026.

B. TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan mempunyai tujuan :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan;
- b. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
- c. Tersusunnya berbagai Kebijakan dan Program Kabupaten Katingan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan;
- d. Penyusunan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

1.4. SISTIMATIKA

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan Latar Belakang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab II diuraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab III diuraikan Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BABIV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab IV ini diuraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan serta Indikator Kinerja.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab V ini diuraikan rumusan dan strategi kebijakan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab VI ini diuraikan Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang ingin dicapai.

Pada Bab VII ini diuraikan Indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk 3 (tiga) tahun kedepan dengan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII. PENUTUP

Pada Bab VIII ini diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN

A. TUGAS

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

B. FUNGSI

Adapun fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana Peraturan Bupati Katingan Nomor : 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja adalah sebagai sebagaimana Peraturan Bupati Katingan Nomor : 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
- f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. KEWENANGAN

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan di Bidang Administrasi Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
2. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - a. Penetapan kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten dan Desa

- b. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten dan APB Desa
- c. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- d. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent)
- e. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan dan pelaksanaan APB Desa.

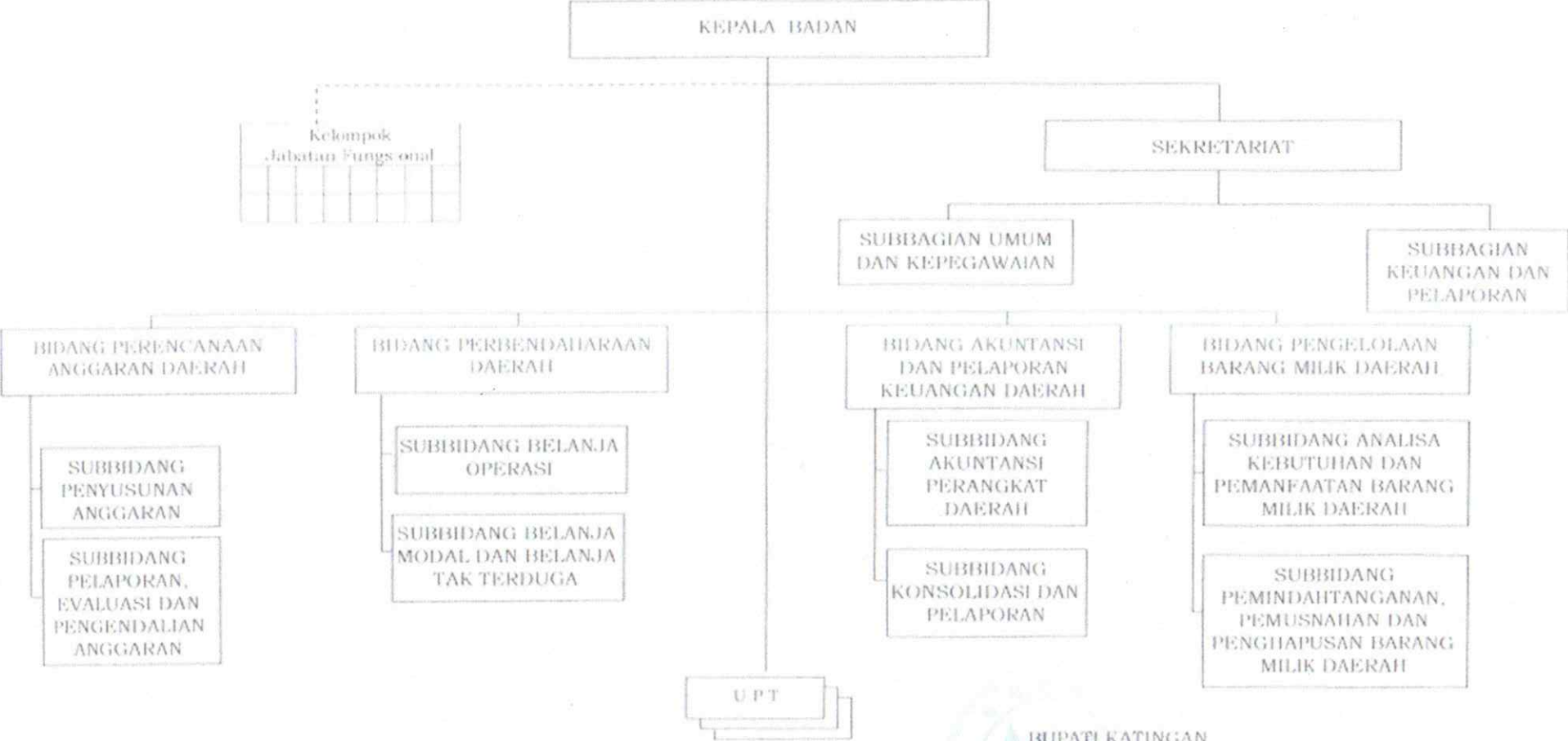
D. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang terdiri dari:
 - a. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Anggaran.
 - b. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Belanja Operasi;
 - 2) Sub Bidang Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga;
 - c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Perangkat Daerah;
 - 2) Sub Bidang Konsolidasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi di bawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAHARIYAS

19

2.2. SUMBER DAYA YANG DIMILIKI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan saat ini berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang, terdiri dari Pejabat eselon IIa berjumlah 1 orang Kepala Badan, pejabat eselon IIIa berjumlah 1 orang Sekretaris Badan, Pejabat Eselon IIIb jumlah 4 (empat) orang, terdiri dari Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sedangkan pejabat eselon 4 berjumlah 14 (empat belas) orang, terdiri dari 8 (delapan) orang Kepala Sub Bidang serta 2 (dua) orang Kepala Sub. Bagian dan 4 (empat) Pejabat Fungsional Tertentu.

Untuk mengetahui lebih jelasnya berkaitan dengan kuantitas sumber daya manusia aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

No	Nama Jabatan	Esselon	Jumlah	Ket
1	Kepala Badan	Esselon II.a	1	
2	Sekretaris	Esselon III.a	1	
3	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Esselon III.b	1	
4	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Esselon III.b	1	
5	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Esselon III.b	1	
6	Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	Esselon III.b	1	
7	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Esselon IV.a	1	
8	Kasubid. Belanja Operasi	Esselon IV.a	1	
9	Kasubid. Analisis Kebutuhan & Pemanfaatan BMD	Esselon IV.a	1	
10	Kasubid. Belanja Modal & Belanja Tak Terduga	Esselon IV.a	1	
11	Kasubid. Akuntansi Perangkat Daerah	Esselon IV.a	1	
12	Kasubid. Penyusunan Anggaran	Esselon IV.a	1	

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah	Ket
13	Kasubag. Keuangan dan Pelaporan	Eselon IV.a	1	
14	Kasubid. Konsolidasi dan Pelaporan	Eselon IV.a	1	
15	Kasubid. Pelaporan, Evaluasi & Pengendalian Anggaran	Eselon IV.a	1	
16	Kasubid. Pemindahtanganan, Pemusnahan & Penghapusan BMD	Eselon IV.a	1	
17	Pejabat Fungsional Tertentu Analis Keuangan Pusat dan Daerah		3	
18	Pejabat Fungsional Tertentu Perencana		1	
19	PPKD	Non Esselon	1	
20	Bendahara Pengeluaran OPD	Non Esselon	2	
21	Pengurus Barang	Non Esselon	1	
22	Pelaksana	Non Esselon	10	
		Non PNS	33	
	TOTAL (PNS + NON PNS)		67	

Sedangkan berdasarkan pendidikan formal yang dimiliki Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dapat diketahui sebagaimana dituangkan dalam tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Kekuatan Personil yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Jabatan	Jumlah						Ket
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
PNS								
1	Kepala Badan	1						
2	Sekretaris		1					
3	Kepala Bidang	1	3					
4	Kepala Subbag/Subbid		10					
5	Pejabat Fungsional Tertentu	1	3					
6	Staf Pelaksana		3	5	6			
Non PNS								
6	Staf Pelaksana		20	1	12			
TOTAL		3	40	6	18			

B. SARANA DAN PRASARANA

Aset / modal berupa barang inventaris yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagai penunjang kegiatan kerja berupa prasarana dan sarana, terdiri dari :

1. Sarana

Sedangkan sarana yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan meliputi sarana transportasi, sarana kerja yang bersifat primer maupun yang sekunder (ditunjukkan pada Lampiran).

2. Prasarana

Prasarana yang dimiliki oleh OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan meliputi 4 (empat) unit bangunan gedung kantor, yaitu 1 (satu) unit bangunan gedung kantor, 1 (satu) unit lainnya adalah aula, 1 (satu) unit lainnya adalah gudang arsip, dan 1 (satu) unit Musholla.

Pemanfaatan gedung bangunan tersebut antara lain untuk gedung I difungsikan untuk kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagai ruang kerja Kepala Badan, ruang rapat, ruang kerja Sekretaris dan Sekretariat, ruang kerja Kepala - Kepala Bidang. Selanjutnya untuk gedung II difungsikan untuk gedung pertemuan/aula. Sedangkan gedung III difungsikan untuk Musholla dan Gudang Arsip Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

A. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan pada tahun 2024 - 2026 yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel TC-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Cakupan Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Cakupan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
3	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP dan Tepat Waktu	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
4	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi BMD	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					

Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2019 – 2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,686,915,023.59	4,804,534,014.50	0.00	0.00	0.00	5,283,008,263.00	4,583,277,538.00	0.00	0.00	0.00	92.90	95.39	-	-	-	2,098,289,807.62	1,973,257,160.20
Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	752,500.00	1,189,000.00	0.00	0.00	0.00	15.05	39.63	-	-	-	1,600,000.00	388,300.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	448,260,392.59	288,100,000.00	0.00	0.00	0.00	354,670,760.00	277,151,942.00	0.00	0.00	0.00	79.12	96.20	-	-	-	147,272,078.52	126,364,540.40
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	505,000,000.00	475,800,000.00	0.00	0.00	0.00	474,618,109.00	455,843,021.00	0.00	0.00	0.00	93.98	95.81	-	-	-	196,160,000.00	186,092,226.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	208,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97	-	-	-	-	41,625,600.00	30,788,400.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,340,000.00	31,025,000.00	0.00	0.00	0.00	20,838,000.00	30,953,000.00	0.00	0.00	0.00	97.65	99.77	-	-	-	10,473,000.00	10,358,200.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	87,200,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	86,045,000.00	70,125,150.00	0.00	0.00	0.00	98.68	82.50	-	-	-	34,440,000.00	31,234,030.00
Penyediaan alat tulis kantor	344,548,600.00	274,000,000.00	0.00	0.00	0.00	344,295,600.00	273,970,180.00	0.00	0.00	0.00	99.93	99.99	-	-	-	123,709,720.00	123,653,156.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	249,564,457.00	239,520,900.00	0.00	0.00	0.00	240,231,640.00	239,306,360.00	0.00	0.00	0.00	96.26	99.91	-	-	-	97,817,071.40	95,907,600.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	53,418,400.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66.77	100.00	-	-	-	17,000,000.00	11,683,680.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	377,200,000.00	704,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,810,305.00	677,618,750.00	0.00	0.00	0.00	96.72	96.25	-	-	-	216,240,000.00	208,485,811.00
Penyediaan peralatan rumah tangga	56,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	49,872,900.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	89.06	100.00	-	-	-	12,700,000.00	11,474,580.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	66,000,000.00	33,783,000.00	0.00	0.00	0.00	36,552,000.00	33,644,000.00	0.00	0.00	0.00	55.38	99.59	-	-	-	19,956,600.00	14,039,200.00
Penyediaan makanan dan minuman	199,500,000.00	109,287,500.00	0.00	0.00	0.00	188,602,500.00	103,707,600.00	0.00	0.00	0.00	94.54	94.89	-	-	-	61,757,500.00	58,462,020.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	707,575,574.00	333,906,614.50	0.00	0.00	0.00	707,488,819.00	333,881,773.00	0.00	0.00	0.00	99.99	99.99	-	-	-	208,296,437.70	208,274,118.40
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	740,550,000.00	534,455,000.00	0.00	0.00	0.00	732,975,000.00	534,446,000.00	0.00	0.00	0.00	98.98	100.00	-	-	-	255,001,000.00	253,484,200.00
Pembinaan Non PNS	1,277,028,000.00	1,243,248,000.00	0.00	0.00	0.00	1,187,623,250.00	1,159,567,250.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.27	-	-	-	504,055,200.00	469,438,100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,320,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	98,965,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.97	-	-	-	20,264,000.00	20,057,000.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba	102,500,000.00	110,836,000.00	0.00	0.00	0.00	92,055,700.00	78,266,720.00	0.00	0.00	0.00	89.81	70.61	-	-	-	42,667,200.00	34,064,484.00
Penyediaan Dana Operasional UPTB di Hampalit	127,700,000.00	137,236,000.00	0.00	0.00	0.00	123,570,280.00	125,031,792.00	0.00	0.00	0.00	96.77	91.11	-	-	-	52,987,200.00	49,720,414.40
Penyediaan Dana Operasional UPTB di Pegatan	82,500,000.00	88,836,000.00	0.00	0.00	0.00	69,325,500.00	77,110,000.00	0.00	0.00	0.00	84.03	86.80	-	-	-	34,267,200.00	29,287,100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14,112,866,426.00	10,221,950,000.00	0.00	0.00	0.00	8,078,214,615.31	9,741,112,271.69	0.00	0.00	0.00	57.24	95.30	-	-	-	4,866,963,285.20	3,563,865,377.40
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	13,409,866,426.00	9,111,950,000.00	0.00	0.00	0.00	7,381,771,426.00	8,639,950,000.00	0.00	0.00	0.00	55.05	94.82	-	-	-	4,504,363,285.20	3,204,344,285.20
Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Penataan Halaman Kantor	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,586,871.69	0.00	0.00	0.00	0.00	99.79	-	-	-	40,000,000.00	39,917,374.34
Pengadaan Peralatan Gedung Aula Kantor	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.73	-	-	-	20,000,000.00	19,946,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	453,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	451,029,264.71	345,070,000.00	0.00	0.00	0.00	99.56	98.59	-	-	-	160,600,000.00	159,219,852.94
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,281,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.43	-	-	-	60,000,000.00	59,656,280.00
Pembangunan Pengembangan Gedung Kantor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kontruksi / Pembangunan Tempat Parkir	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.06	-	-	-	30,000,000.00	29,718,800.00
Pembangunan Drainase Kantor	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	-	-	-	2,000,000.00	1,980,000.00
Pembangunan Konstruksi Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Pengembangan Taman Kantor	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,907,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	99.81	-	-	-	-	10,000,000.00	9,981,433.48
Pembangunan Rumah Genset	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,506,757.21	0.00	0.00	0.00	0.00	97.75	-	-	-	-	40,000,000.00	39,101,351.44
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	110,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	62,950,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	57.23	100.00	-	-	-	25,000,000.00	15,590,000.00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	110,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	62,950,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	57.23	100.00	-	-	-	25,000,000.00	15,590,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0.00	261,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,689,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.16	-	-	-	52,246,000.00	45,537,960.00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	0.00	32,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.63	-	-	-	6,574,000.00	5,629,200.00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	0.00	53,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94	-	-	-	10,744,000.00	9,448,400.00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0.00	36,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50	-	-	-	7,340,000.00	6,349,000.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Penyusunan LAKIP DAN PK	0.00	38,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.58	-	-	-	7,620,000.00	6,444,980.00
Penyusunan RKA dan DPA	0.00	48,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.77	-	-	-	9,760,000.00	9,640,180.00
Penyusunan LKPJ dan LPPD	0.00	51,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.63	-	-	-	10,208,000.00	8,026,200.00
Program Perbendaharaan dan Kasda Perkantoran	575,000,000.00	399,401,600.00	0.00	0.00	0.00	565,441,150.00	381,965,700.00	0.00	0.00	0.00	98.34	95.63	-	-	-	194,880,320.00	189,481,370.00
Penyediaan Data Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah	35,075,000.00	76,799,600.00	0.00	0.00	0.00	34,855,450.00	73,559,700.00	0.00	0.00	0.00	99.37	95.78	-	-	-	22,374,920.00	21,683,030.00
Penyusunan Laporan SPD	87,700,000.00	45,040,000.00	0.00	0.00	0.00	87,305,500.00	37,030,000.00	0.00	0.00	0.00	99.55	82.22	-	-	-	26,548,000.00	24,867,100.00
Penyusunan Laporan KASDA	98,655,000.00	43,932,000.00	0.00	0.00	0.00	97,362,000.00	43,644,000.00	0.00	0.00	0.00	98.69	99.34	-	-	-	28,517,400.00	28,201,200.00
Penyusunan Laporan SP2D	203,570,000.00	133,630,000.00	0.00	0.00	0.00	203,248,200.00	132,417,000.00	0.00	0.00	0.00	99.84	99.09	-	-	-	67,440,000.00	67,133,040.00
Penyusunan Laporan Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah	150,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	142,670,000.00	95,315,000.00	0.00	0.00	0.00	95.11	95.32	-	-	-	50,000,000.00	47,597,000.00
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	751,892,000.00	830,598,000.00	0.00	0.00	0.00	566,842,890.00	472,605,500.00	0.00	0.00	0.00	75.39	56.90	-	-	-	316,498,000.00	207,889,678.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	121,000,000.00	72,105,000.00	0.00	0.00	0.00	99,734,700.00	72,104,800.00	0.00	0.00	0.00	82.43	100.00	-	-	-	38,621,000.00	34,367,900.00
Peningkatan Penatausahaan/ Verifikasi Keuangan	181,000,000.00	180,583,000.00	0.00	0.00	0.00	180,820,350.00	177,552,000.00	0.00	0.00	0.00	99.90	98.32	-	-	-	72,316,600.00	71,674,470.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kabupaten	96,100,000.00	115,710,000.00	0.00	0.00	0.00	94,434,000.00	108,436,000.00	0.00	0.00	0.00	98.27	93.71	-	-	-	42,362,000.00	40,574,000.00
Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Dana Operasional Tim TPTGR Kab. Katingan	201,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,049,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.15	-	-	-	-	40,314,400.00	19,409,888.00
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	152,220,000.00	462,200,000.00	0.00	0.00	0.00	94,804,400.00	114,512,700.00	0.00	0.00	0.00	62.28	24.78	-	-	-	122,884,000.00	41,863,420.00
Program Penatausahaan Aset Daerah	836,449,600.00	500,200,000.00	0.00	0.00	0.00	432,991,500.00	480,190,000.00	0.00	0.00	0.00	51.77	96.00	-	-	-	267,329,920.00	182,636,300.00
Penyusunan Standar Satuan Harga	51,800,000.00	31,775,000.00	0.00	0.00	0.00	45,263,000.00	29,788,000.00	0.00	0.00	0.00	87.38	93.75	-	-	-	16,715,000.00	15,010,200.00
Rekonsiliasi Aset Daerah	191,672,000.00	192,000,000.00	0.00	0.00	0.00	182,778,500.00	187,917,000.00	0.00	0.00	0.00	95.36	97.87	-	-	-	76,734,400.00	74,139,100.00
Penyusunan Laporan Daftar Kebutuhan Barang Daerah	33,677,600.00	23,900,000.00	0.00	0.00	0.00	31,045,000.00	23,880,000.00	0.00	0.00	0.00	92.18	99.92	-	-	-	11,515,520.00	10,985,000.00
Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah	128,600,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,140,000.00	141,720,000.00	0.00	0.00	0.00	36.66	97.74	-	-	-	54,720,000.00	37,772,000.00
Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	430,700,000.00	107,525,000.00	0.00	0.00	0.00	126,765,000.00	96,885,000.00	0.00	0.00	0.00	29.43	90.10	-	-	-	107,645,000.00	44,730,000.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	401,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.51	-	-	-	-	80,300,000.00	75,089,800.00
Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	36,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08	-	-	-	-	7,260,000.00	3,200,000.00
Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah	298,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.76	-	-	-	-	59,600,000.00	58,858,000.00
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	-	-	-	-	2,640,000.00	2,354,000.00
Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	-	-	-	-	10,800,000.00	10,677,800.00
Pekan Panutan PBB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
Program Pembukuan dan Pelaporan	260,012,400.00	64,553,660.00	0.00	0.00	0.00	204,487,000.00	49,443,000.00	0.00	0.00	0.00	78.65	76.59	-	-	-	64,913,212.00	50,786,000.00
Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB	70,375,600.00	28,300,000.00	0.00	0.00	0.00	52,068,000.00	16,843,000.00	0.00	0.00	0.00	73.99	59.52	-	-	-	19,735,120.00	13,782,200.00
Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah	108,077,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.22	-	-	-	-	21,615,440.00	19,068,200.00
Pembukuan Penerimaan Pajak, Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB	39,309,600.00	36,253,660.00	0.00	0.00	0.00	23,628,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00	0.00	60.11	89.92	-	-	-	15,112,652.00	11,245,600.00
Rekonsiliasi Penerimaan PAD dengan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	-	-	-	450,000.00	450,000.00
Intensifikasi Pajak	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	-	-	-	-	8,000,000.00	6,240,000.00
Program Penagihan dan Keberatan	625,425,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	615,058,500.00	60,350,400.00	0.00	0.00	0.00	98.34	92.85	-	-	-	138,085,000.00	135,081,780.00
Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	398,125,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	395,120,000.00	60,350,400.00	0.00	0.00	0.00	99.25	92.85	-	-	-	92,625,000.00	91,094,080.00
Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah	59,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.55	-	-	-	-	11,900,000.00	11,845,900.00
Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	149,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.94	-	-	-	-	29,860,000.00	29,842,000.00
Rapat Evaluasi Peraturan/Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Alat Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.16	-	-	-	-	3,700,000.00	2,299,800.00
Program Peningkatan Penerimaan Pajak	0.00	339,143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.52	-	-	-	67,828,600.00	63,431,000.00
Pembinaan dan Penyuluhan Subjek PBB dan BPHTB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Sistem Informasi PBB dan BPHTB	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.88	-	-	-	50,000,000.00	49,939,600.00
Pemutakhiran Data dan Pengembangan Data Pajak dan Retribusi Daerah	0.00	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.75	-	-	-	6,250,000.00	1,922,000.00
Penilaian dan Penetapan PBB	0.00	57,893,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.92	-	-	-	11,578,600.00	11,569,400.00
Program Perencanaan Penganggaran Daerah	0.00	478,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,264,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.08	-	-	-	95,650,000.00	84,252,880.00
Penyediaan Data Penyusunan APBD	0.00	114,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,329,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.94	-	-	-	22,952,000.00	19,265,820.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	0.00	59,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.70	-	-	-	11,972,000.00	10,140,200.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	0.00	48,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.97	-	-	-	9,680,000.00	8,612,400.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD	0.00	66,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.08	-	-	-	13,348,000.00	12,558,000.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	0.00	55,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.59	-	-	-	11,088,000.00	10,044,200.00
Penyusunan KUA dan PPAS dan Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan	0.00	133,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,161,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.81	-	-	-	26,610,000.00	23,632,260.00
Pengembangan dan Pengelolaan e-badgeting Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0.00	0.00	15,727,149,782.00	29,483,912,319.00	0.00	0.00	0.00	12,382,510,751.50	23,144,591,474.00	0.00	-	-	78.73	78.50	-	9,042,212,420.20	7,105,420,445.10
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00	0.00	240,419,524.00	277,313,364.00	0.00	0.00	0.00	191,640,400.00	221,286,500.00	0.00	-	-	79.71	79.80	-	103,546,577.60	82,585,380.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0.00	0.00	75,552,060.00	90,382,166.00	0.00	0.00	0.00	60,908,000.00	76,765,400.00	0.00	-	-	80.62	84.93	-	33,186,845.20	27,534,680.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	0.00	0.00	56,779,724.00	78,051,684.00	0.00	0.00	0.00	53,499,600.00	62,387,800.00	0.00	-	-	94.22	79.93	-	26,966,281.60	23,177,480.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00	0.00	108,087,740.00	108,879,514.00	0.00	0.00	0.00	77,232,800.00	82,133,300.00	0.00	-	-	71.45	75.44	-	43,393,450.80	31,873,220.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0.00	0.00	8,695,116,998.00	8,655,112,946.00	0.00	0.00	0.00	7,883,632,047.50	6,658,288,359.00	0.00	-	-	90.67	76.93	-	3,470,045,988.80	2,908,384,081.30
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0.00	0.00	8,633,436,998.00	8,431,379,152.00	0.00	0.00	0.00	7,825,472,047.50	6,515,008,659.00	0.00	-	-	90.64	77.27	-	3,412,963,230.00	2,868,096,141.30
Koordinasi dan Penyusunan	0.00	0.00	0.00	67,528,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,420,700.00	0.00	-	-	-	89.47	-	13,505,680.00	12,084,140.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	0.00	0.00	61,680,000.00	156,205,394.00	0.00	0.00	0.00	58,160,000.00	82,859,000.00	0.00	-	-	94.29	53.04	-	43,577,078.80	28,203,800.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	0.00	30,000,000.00	539,227,909.00	0.00	0.00	0.00	27,900,000.00	352,371,950.00	0.00	-	-	93.00	65.35	-	113,845,581.80	76,054,390.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	0.00	366,852,967.00	0.00				252,221,950.00	0.00	-	-	-	68.75	-	73,370,593.40	50,444,390.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	0.00	0.00	30,000,000.00	172,374,942.00	0.00	0.00	0.00	27,900,000.00	100,150,000.00	0.00	-	-	93.00	58.10	-	40,474,988.40	25,610,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	0.00	0.00	2,274,781,070.00	3,795,600,263.00	0.00	0.00	0.00	1,606,700,155.00	2,037,692,729.00	0.00	-	-	70.63	53.69	-	1,214,076,266.60	728,878,576.80
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	0.00	0.00	86,177,797.00	101,875,076.00	0.00	0.00	0.00	32,096,500.00	100,700,000.00	0.00	-	-	37.24	98.85	-	37,610,574.60	26,559,300.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	468,079,666.00	1,303,551,735.00	0.00	0.00	0.00	438,032,700.00	767,373,100.00	0.00	-	-	93.58	58.87	-	354,326,280.20	241,081,160.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0.00	0.00	15,630,906.00	142,277,135.00	0.00	0.00	0.00	15,629,500.00	108,068,500.00	0.00	-	-	99.99	75.96	-	31,581,608.20	24,739,600.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	0.00	400,205,863.00	582,021,796.00	0.00	0.00	0.00	253,362,778.00	222,146,929.00	0.00	-	-	63.31	38.17	-	196,445,531.80	95,101,941.40
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	0.00	279,967,838.00	307,964,621.00	0.00	0.00	0.00	259,488,200.00	87,403,000.00	0.00	-	-	92.69	28.38	-	117,586,491.80	69,378,240.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	0.00	0.00	70,179,000.00	87,844,900.00	0.00	0.00	0.00	66,872,000.00	70,904,000.00	0.00	-	-	95.29	80.71	-	31,604,780.00	27,555,200.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	0.00	954,540,000.00	1,270,065,000.00	0.00	0.00	0.00	541,218,477.00	681,097,200.00	0.00	-	-	56.70	53.63	-	444,921,000.00	244,463,135.40
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	0.00	2,320,261,600.00	13,683,547,180.00	0.00	0.00	0.00	1,149,330,000.00	12,576,046,397.00	0.00	-	-	49.53	91.91	-	3,200,761,756.00	2,745,075,279.40
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	0.00	2,320,261,600.00	13,433,122,300.00	0.00	0.00	0.00	1,149,330,000.00	12,576,046,397.00	0.00	-	-	49.53	93.62	-	3,150,676,780.00	2,745,075,279.40
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	0.00	0.00	250,424,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	50,084,976.00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0.00	0.00	1,052,368,400.00	1,229,077,950.00	0.00	0.00	0.00	893,306,717.00	738,341,699.00	0.00	-	-	84.89	60.07	-	456,289,270.00	326,329,683.20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	0.00	4,650,000.00	44,550,000.00	0.00	0.00	0.00	748,500.00	0.00	0.00	-	-	16.10	0.00	-	9,840,000.00	149,700.00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	0.00	306,954,400.00	355,110,800.00	0.00	0.00	0.00	247,497,717.00	215,975,199.00	0.00	-	-	80.63	60.82	-	132,413,040.00	92,694,583.20

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	114,160,000.00	101,856,500.00	0.00	0.00	0.00	80,520,500.00	40,328,500.00	0.00	-	-	70.53	39.59	-	43,203,300.00	24,169,800.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0.00	0.00	626,604,000.00	727,560,650.00	0.00	0.00	0.00	564,540,000.00	482,038,000.00	0.00	-	-	90.10	66.25	-	270,832,930.00	209,315,600.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0.00	0.00	1,114,202,190.00	1,304,032,707.00	0.00	0.00	0.00	630,001,432.00	560,563,840.00	0.00	-	-	56.54	42.99	-	483,646,979.40	238,113,054.40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	0.00	894,284,620.00	910,244,677.00	0.00	0.00	0.00	489,729,007.00	393,952,440.00	0.00	-	-	54.76	43.28	-	360,905,859.40	176,736,289.40
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	0.00	219,917,570.00	393,788,030.00	0.00	0.00	0.00	140,272,425.00	166,611,400.00	0.00	-	-	63.78	42.31	-	122,741,120.00	61,376,765.00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0.00	0.00	3,604,927,712.00	4,373,758,689.00	0.00	0.00	0.00	3,030,222,842.00	2,854,468,055.00	0.00	-	-	84.06	65.26	-	1,595,737,280.20	1,176,938,179.40
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	0.00	0.00	1,232,618,023.00	1,599,255,126.00	0.00	0.00	0.00	1,029,218,114.00	1,069,126,270.00	0.00	-	-	83.50	66.85	-	566,374,629.80	419,668,876.80
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	0.00	0.00	177,994,720.00	124,329,744.00	0.00	0.00	0.00	160,057,094.00	98,085,000.00	0.00	-	-	89.92	78.89	-	60,464,892.80	51,628,418.80
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0.00	0.00	126,227,906.00	69,092,700.00	0.00	0.00	0.00	93,145,700.00	49,939,000.00	0.00	-	-	73.79	72.28	-	39,064,121.20	28,616,940.00
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0.00	0.00	265,411,200.00	287,122,232.00	0.00	0.00	0.00	225,567,500.00	141,293,600.00	0.00	-	-	84.99	49.21	-	110,506,686.40	73,372,220.00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0.00	0.00	260,177,065.00	311,941,289.00	0.00	0.00	0.00	177,756,416.00	233,940,200.00	0.00	-	-	68.32	74.99	-	114,423,670.80	82,339,323.20
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0.00	0.00	402,807,132.00	806,769,161.00	0.00	0.00	0.00	372,691,404.00	545,868,470.00	0.00	-	-	92.52	67.66	-	241,915,258.60	183,711,974.80
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	0.00	0.00	1,103,017,721.00	1,441,588,642.00	0.00	0.00	0.00	949,166,378.00	952,381,435.00	0.00	-	-	86.05	66.06	-	508,921,272.60	380,309,562.60
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0.00	0.00	458,062,000.00	544,960,700.00	0.00	0.00	0.00	394,236,994.00	334,159,388.00	0.00	-	-	86.07	61.32	-	200,604,540.00	145,679,276.40
Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	0.00	0.00	101,683,978.00	146,603,875.00	0.00	0.00	0.00	89,843,016.00	110,171,692.00	0.00	-	-	88.36	75.15	-	49,657,570.60	40,002,941.60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	0.00	0.00	200,919,440.00	340,735,899.00	0.00	0.00	0.00	175,723,970.00	222,276,850.00	0.00	-	-	87.46	65.23	-	108,331,067.80	79,600,164.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga PFK																	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0.00	0.00	42,995,000.00	37,794,499.00	0.00	0.00	0.00	35,283,000.00	28,314,993.00	0.00	-	-	82.06	74.92	-	16,157,899.80	12,719,598.60
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota	0.00	0.00	299,357,303.00	371,493,669.00	0.00	0.00	0.00	254,079,398.00	257,458,512.00	0.00	-	-	84.87	69.30	-	134,170,194.40	102,307,582.00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	0.00	0.00	930,801,968.00	1,005,811,781.00	0.00	0.00	0.00	714,388,350.00	644,229,075.00	0.00	-	-	76.75	64.05	-	387,322,749.80	271,723,485.00
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban	0.00	0.00	165,868,196.00	147,611,122.00	0.00	0.00	0.00	117,248,900.00	97,330,500.00	0.00	-	-	70.69	65.94	-	62,695,863.60	42,915,880.00
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	0.00	0.00	395,681,719.00	402,230,412.00	0.00	0.00	0.00	322,754,000.00	217,728,050.00	0.00	-	-	81.57	54.13	-	159,582,426.20	108,096,410.00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	0.00	0.00	244,253,164.00	196,138,832.00	0.00	0.00	0.00	177,615,200.00	174,354,525.00	0.00	-	-	72.72	88.89	-	88,078,399.20	70,393,945.00
Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0.00	0.00	0.00	15,900,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,000.00	0.00	-	-	-	14.87	-	3,180,043.80	473,000.00
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	120,182,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,830,000.00	0.00	-	-	-	69.75	-	24,036,459.20	16,766,000.00
Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kota	0.00	0.00	124,998,889.00	123,748,900.00	0.00	0.00	0.00	96,770,250.00	68,621,000.00	0.00	-	-	77.42	55.45	-	49,749,557.80	33,078,250.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	0.00	0.00	338,490,000.00	327,103,140.00	0.00	0.00	0.00	337,450,000.00	188,731,275.00	0.00	-	-	99.69	57.70	-	133,118,628.00	105,236,255.00
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	0.00	0.00	338,490,000.00	235,303,140.00	0.00	0.00	0.00	337,450,000.00	105,553,050.00	0.00	-	-	99.69	44.86	-	114,758,628.00	88,600,610.00
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	0.00	0.00	0.00	91,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,178,225.00	0.00	-	-	-	90.61	-	18,360,000.00	16,635,645.00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0.00	0.00	777,284,601.00	1,711,252,238.00	0.00	0.00	0.00	585,842,430.00	1,034,514,634.00	0.00	-	-	75.37	60.45	-	497,707,367.80	324,071,412.80
Pengelolaan Barang Milik Daerah	0.00	0.00	777,284,601.00	1,711,252,238.00	0.00	0.00	0.00	585,842,430.00	1,034,514,634.00	0.00	-	-	75.37	60.45	-	497,707,367.80	324,071,412.80
Penyusunan Standar Harga	0.00	0.00	114,596,621.00	104,190,782.00	0.00	0.00	0.00	27,186,430.00	58,250,000.00	0.00	-	-	23.72	55.91	-	43,757,480.60	17,087,286.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	0.00	0.00	118,210,000.00	532,711,000.00	0.00	0.00	0.00	117,290,000.00	346,237,142.00	0.00	-	-	99.22	65.00	-	130,184,200.00	92,705,428.40
Inventarisasi Barang Milik Daerah	0.00	0.00	155,385,180.00	179,014,000.00	0.00	0.00	0.00	121,519,000.00	146,374,792.00	0.00	-	-	78.21	81.77	-	66,879,836.00	53,578,758.40
Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	0.00	0.00	270,484,800.00	757,300,456.00	0.00	0.00	0.00	214,947,000.00	420,042,700.00	0.00	-	-	79.47	55.47	-	205,557,051.20	126,997,940.00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0.00	0.00	118,608,000.00	138,036,000.00	0.00	0.00	0.00	104,900,000.00	63,610,000.00	0.00	-	-	88.44	46.08	-	51,328,800.00	33,702,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	238,863,560,438.00	229,475,152,652.00	0.00	0.00	0.00	237,124,322,375.00	85,529,342,265.00	0.00	-	-	99.27	37.27	-	93,667,742,618.00	64,530,732,928.00
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	0.00	0.00	2,304,941,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,559,993.00	0.00	0.00	-	-	67.97	-	-	460,988,387.80	313,311,998.60
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	0.00	0.00	209,272,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,191,718.00	0.00	0.00	-	-	45.01	-	-	41,854,593.00	18,838,343.60
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0.00	0.00	385,279,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,040,300.00	0.00	0.00	-	-	44.65	-	-	77,055,899.40	34,408,060.00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0.00	0.00	159,762,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,226,725.00	0.00	0.00	-	-	29.56	-	-	31,952,453.20	9,445,345.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0.00	0.00	239,758,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,800,000.00	0.00	0.00	-	-	99.60	-	-	47,951,713.80	47,760,000.00



Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	0.00	0.00	421,424,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,428,500.00	0.00	0.00	-	-	64.88	-	-	84,284,887.60	54,685,700.00
Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0.00	0.00	374,354,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,095,000.00	0.00	0.00	-	-	97.26	-	-	74,870,966.00	72,819,000.00
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBBP2 serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB	0.00	0.00	199,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,760,000.00	0.00	0.00	-	-	81.62	-	-	39,880,000.00	32,552,000.00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	0.00	0.00	64,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,516,000.00	0.00	0.00	-	-	83.96	-	-	12,986,400.00	10,903,200.00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0.00	0.00	39,214,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,812,750.00	0.00	0.00	-	-	96.42	-	-	7,842,995.80	7,562,550.00
Penagihan Pajak Daerah	0.00	0.00	116,116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,419,000.00	0.00	0.00	-	-	68.40	-	-	23,223,200.00	15,883,800.00
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,000.00	0.00	0.00	-	-	79.80	-	-	1,000,000.00	798,000.00
Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	0.00	0.00	58,658,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,520,000.00	0.00	0.00	-	-	52.03	-	-	11,731,719.00	6,104,000.00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0.00	0.00	31,767,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760,000.00	0.00	0.00	-	-	24.43	-	-	6,353,560.00	1,552,000.00
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0.00	0.00	236,558,618,499.00	229,475,152,652.00	0.00	0.00	0.00	235,557,762,382.00	85,529,342,265.00	0.00	-	-	99.58	37.27	-	93,206,754,230.20	64,217,420,929.40
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	0.00	0.00	9,624,396,199.00	15,103,325,552.00	0.00	0.00	0.00	8,897,123,640.00	7,710,614,919.00	0.00	-	-	92.44	51.05	-	4,945,544,350.20	3,321,547,711.80
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0.00	0.00		203,171,827,100.00	0.00	0.00	0.00		68,457,824,558.00	0.00	-	-	-	33.69	-	40,634,365,420.00	13,691,564,911.60
Sub Kegiatan Pengelolaan DBHKabupaten/Kota	0.00	0.00	2,500,000,000.00	8,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,474,916,442.00	7,266,450,079.00	0.00	-	-	99.00	83.52	-	2,240,000,000.00	1,948,273,304.20
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0.00	0.00	224,434,222,300.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	224,185,722,300.00	2,094,452,709.00	0.00	-	-	99.89	83.78	-	45,386,844,460.00	45,256,035,001.80

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PELAYANAN

Beberapa faktor yang memberi pengaruh kepada **kesuksesan pelayanan** Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan meliputi :

1. Memanfaatkan SDM yang ada (khususnya yang memiliki kompetensi);
2. Penerapan teknologi informasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Kebijakan Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Dukungan dari Bupati/Wakil Bupati Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan terhadap upaya pengelolaan keuangan daerah;
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

C. FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELUM BERHASILNYA PELAYANAN

Sebagaimana dijelaskan diatas, disamping terdapat faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, juga terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat berhasilnya pelayanan. Faktor-faktor penghambat dimaksud dapat berasal dari internal SKPD maupun eksternal SKPD.

1. Faktor Internal SKPD

- a. Kurangnya SDM yang memahami secara utuh konsep dan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pertanggungjawaban APBD;
- b. Masih lemahnya koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas yang menyangkut administrasi dan peraturan;
- c. Kurangnya sarana pendukung dalam upaya pengelolaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Faktor Eksternal SKPD

- a. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum terkoneksi antara penatausahaan dan pelaporan sehingga untuk laporan ke pusat masih digunakan secara manual;
- b. Dalam menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Pusat belum mempunyai / memiliki perpanjangan tangan di Provinsi sehingga pada tahapan konsultasi dan koordinasi mengalami kesulitan;
- c. Koneksi Jaringan Internet belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Katingan;
- d. Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal berdampak pada Peraturan Daerah yang mendorong timbulnya biaya tinggi dan menghambat investasi di daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Kondisi politik dan keamanan daerah;
- f. Masalah yang timbul dengan diterapkannya sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki;
- g. Regulasi yang ada saat ini belum mampu mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal serta pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2.4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor : 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja adalah sebagai sebagaimana Peraturan Bupati Katingan Nomor : 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
- f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Katingan, selain sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bertindak sebagai penyelenggara dan koordinator seluruh usaha bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Katingan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala pelayanan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum Optimalnya sistim pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Belum Optimalnya Pelayanan Penatausahaan dan Sistim Pelaporan Keuangan	1. Belum maksimalnya kelengkapan Dokumen Keuangan Daerah 2. Belum terselesaikannya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah
		2. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang milik daerah	1. Belum Optimalnya Analisis Kebutuhan Barang Daerah 2. Kualitas Data Aset Daerah Rendah
		3. Efektifitas Penganggaran Daerah Belum Optimal	1. Pemahaman terkait Penganggaran masih belum memadai

Tabel. 3.2. Hasil Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belum optimalnya SDM Aparatur		Kurangnya SDM yang memahami secara utuh konsep dan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pertanggungjawaban APBD	Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum terkoneksi antara penatausahaan dan pelaporan sehingga untuk laporan ke pusat masih digunakan secara manual	
			Masih lemahnya koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas yang menyangkut administrasi dan peraturan	Dalam menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Pusat belum mempunyai / memiliki perpanjangan tangan di Provinsi sehingga pada tahapan konsultasi dan koordinasi mengalami kesulitan	
			Kurangnya sarana pendukung dalam upaya pengelolaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah	Koneksi Jaringan Internet belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Katingan	
			Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan dan asset daerah	Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal berdampak pada Peraturan Daerah yang mendorong timbulnya biaya tinggi dan menghambat investasi di daerah dan pengelolaan keuangan daerah	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kondisi politik dan keamanan daerah	
				Masalah yang timbul dengan diterapkannya sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya ouput dan outcome yang dikehendaki	
				Regulasi yang ada saat ini belum mampu mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal serta pengelolaan keuangan dan aset daerah	



3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

A. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KEUANGAN

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 Prioritas (Nawa Cita) dalam pemerintahan menuju Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan adalah Nawa Cita nomor 7 (tujuh). Upaya yang dapat ditempuh Kementerian Keuangan adalah melalui penguatan kapasitas fiskal negara.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kapasitas fiskal negara yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan utang. Sasaran tersebut dirinci sebagai berikut :

1. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui :
 - a) Penyempurnaan regulasi pengelolaan PNBP;
 - b) Pengembangan dan penyempurnaan sistem PNBP berbasis IT;
 - c) Inventarisasi, intensifikasi dan/ atau ekstensifikasi PNBP;
 - d) Memperkuat monitoring dan evaluasi PNBP;
 - e) Meningkatkan sinergi dan kapasitas *stakeholders* pengelola PNBP;
 - f) Optimalisasi PNBP migas dan nonmigas;
 - g) Optimalisasi PNBP umum dan BLU
2. Peningkatan kualitas belanja melalui :
 - a) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;
 - b) Pencanangan program penghematan dengan pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dari pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (*quick wins*);
 - c) Merancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarnya dan tepat sasaran;

- d) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;
- e) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- f) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat *mandatory spending* seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa, anggaran kesehatan dan lainnya;
- g) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energi;
- h) Melakukan sinkronisasi atas pengelolaan defisit anggaran pada batas yang ditentukan.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi difokuskan pada :

1. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran;
2. Melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia;
3. Peningkatan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan;
4. Pemberian insentif bagi kementerian lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya rendah.

B. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Daerah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas merupakan suatu kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih dalam tahap penyusunan dan belum dipublikasikan

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan masih belum ada menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah (RTRWP).

3.4. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil telaahan pada sub bab diatas maka isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, antara lain :

1. Kualitas SDM aparatur masih belum memadai;
2. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan penyusunan penganggaran;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

A. TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi ideal yang ingin di capai, dihasilkan atau diwujudkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realitas antara keinginan (das sollen) dan kenyataan (das sein) dalam kurun waktu tertentu.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dengan karakteristik :

1. Idealistik dalam arti bahwa tujuan adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan sesuatu serta keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih dan lebih berhasil;
2. Jangkauan ke depan dalam arti bahwa tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan;
3. Abstrak dalam arti bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. Konsisten dalam arti bahwa tujuan harus dicapai secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tujuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan penyusunan kebijakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan adalah target - target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu :

- *Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel*

B. SASARAN

Sasaran merupakan target spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran harus bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sehingga dapat diukur, dinilai serta berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu, baik bulanan, triwulan, semester atau tahunan.



Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan difokuskan pada upaya tercapainya perwujudan profesionalisme aparatur yang mendukung perwujudan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan serta peningkatan mutu pelayanan, yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BKAD*
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah*
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah*
- d. Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah*

Tabel TC-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

NO.	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TARGET KINERJA			TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		
			2024	2025	2026			OUTPUT	OUTCOME	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	WTP	WTP	WTP	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transaran dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BKAD	Nilai LAKIP	Terselenggaranya Penunjang Urusan Kelembagaan BKAD	B	B	B
							Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100 %	100 %	100 %
							Meningkatnya akunbilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terbina dan Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %
							Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi BMD	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perencanaan strategis sebagai salah satu unsur manajemen strategis menjadi suatu yang urgen, dikonseptualisasikan dan diaplikasikan dalam proses pembuatan keputusan berdasarkan perkiraan masa depan. Sedangkan strategi adalah cara efektif yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam upaya mencapai tujuan, sasaran dan misi dalam konsistensi Visi organisasi.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan adalah tahap akhir dari perencanaan strategis yang merupakan komitmen organisasi dari pimpinan puncak sampai line terbawah. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dengan melakukan strategi tertentu untuk mencapainya. *Strategi* yang akan ditempuh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel TC-26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BKAD	- Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kapasitas kelembagaan	- Peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur - Peningkatan kapasitas kelembagaan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penatausahaan dan Sistim Pelaporan Keuangan	- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah	- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan aset daerah secara tertib, transparan dan akuntabel	- Peningkatkan Pengelolaan Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Barang milik daerah
	Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah	- Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran	- Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan 2024-2026.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							OPD/Bidang Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK				WTP WTP WTP WTP										BPKAD	
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan BKAD	Persentase Cakupan Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	Terselenggara any Penunjang Urusan Kelembagaan BKAD	14,699,081,058.00	8	8	20,386,915,155.00	8	25,170,721,665.00	8	34,443,542,648.00	
				5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	297,880,558.00	8 Dokumen	8 Dokumen	327,668,613.80	8 Dokumen	360,435,475.8	8 Dokumen	396,479,023.69	Sekretariat
				5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74,025,619.00	2 Dokumen	2 Dokumen	81,428,180.90	2 Dokumen	89,570,998.99	2 Dokumen	98,528,098.89	
				5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	120,971,684.00	2 Dokumen	2 Dokumen	133,068,852.40	2 Dokumen	146,375,737.64	2 Dokumen	161,013,311.90	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							DPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.883.255.00	3 Laporan	3 Laporan	113.171.580.50	3 Laporan	124.488.738.55	3 Laporan	136.937.612.90	
				5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Tersusunnya Dokumen Laporan	7.429.878.288.00	2 Dokumen	2 Dokumen	8.384.539.908.00	2 Dokumen	14.123.828.893.30	2 Dokumen	22.582.960.598.14	Sekretariat
				5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7.207.177.183.00	34 Orang	34 Orang	8.139.568.692.50	34 Orang	13.854.360.556.25	34 Orang	22.286.545.427.38	
				5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.638.172.00	1 Laporan	1 Laporan	61.201.989.20	1 Laporan	67.322.188.12	1 Laporan	74.054.406.93	
				5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	167.062.933.00	1 Laporan	1 Laporan	183.769.226.30	1 Laporan	202.146.148.93	1 Laporan	222.360.763.82	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							DPD/Bidang Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan kompetensinya	Meningkatnya kompetensi sdm aparatur sesuai bidangnya	125,090,837.00	100 %	100 %	192,799,920.70	100 %	151,359,912.77	100 %	166,495,904.05	Sekretariat
				5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	1 Paket	55,200,000.00	1 Paket	-	1 Paket	-	
				5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125,090,837.00	25 Orang	25 Orang	137,599,920.70	25 Orang	151,359,912.77	25 Orang	166,495,904.05	
				5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,851,158,754.00	12 Bulan	12 Bulan	3,136,274,629.40	12 Bulan	3,449,902,092.34	12 Bulan	3,794,892,301.57	Sekretariat
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	117,095,084.00	2 Paket	2 Paket	128,804,592.40	2 Paket	141,685,051.64	2 Paket	155,853,556.80	
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	743,135,159.00	12 Paket	12 Paket	817,448,674.90	12 Paket	899,193,542.39	12 Paket	989,112,896.63	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							OPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	45,370,344.00	12 Paket	12 Paket	49,907,378.40	12 Paket	54,898,116.24	12 Paket	60,387,927.86	
				5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	623,764,156.00	12 Paket	12 Paket	686,140,571.60	12 Paket	754,754,628.76	12 Paket	830,230,091.64	
				5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	307,964,621.00	12 Paket	12 Paket	338,761,083.10	12 Paket	372,637,191.41	12 Paket	409,900,910.55	
				5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96,629,390.00	12 Dokumen	12 Dokumen	106,292,329.00	12 Dokumen	116,921,561.90	12 Dokumen	128,613,718.09	
				5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	917,200,000.00	12 Laporan	12 Laporan	1,008,920,000.00	12 Laporan	1,109,812,000.00	12 Laporan	1,220,793,200.00	
				5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Penyediaan Barang Milik Daerah	956,678,128.00	2 Paket	2 Paket	5,003,398,140.80	2 Paket	3,408,737,954.88	2 Paket	3,458,611,750.37	Sekretariat
				5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	544,498,000.00	1 Unit	1 Unit	4,550,000,000.00	1 Unit	2,910,000,000.00	1 Unit	2,910,000,000.00	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							OPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	412.180.128.00	1 Unit	1 Unit	453.398.140.80	1 Unit	498.737.954.88	1 Unit	548.611.750.37	
				5.02.012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi nya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,528,023,000.00	12 Bulan	12 Bulan	1,680,825,300.00	12 Bulan	1,848,907,830.00	12 Bulan	2,033,798,613.00	Sekretariat
				5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.005.000.00	20 Laporan	20 Laporan	53.905.500.00	20 Laporan	59.296.050.00	20 Laporan	65.225.655.00	
				5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.012.000.00	12 Laporan	12 Laporan	603.913.200.00	12 Laporan	664.304.520.00	12 Laporan	730.734.972.00	
				5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.821.600.00	12 Laporan	12 Laporan	195.603.760.00	12 Laporan	215.164.136.00	12 Laporan	236.680.549.60	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							DPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	752,184,400.00	55 Laporan	55 Laporan	827,402,840.00	55 Laporan	910,143,124.00	55 Laporan	1,001,157,436.40	
				5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang memperoleh pemeliharaan dan perijinan	Tersedianya BMD yang memperoleh pemeliharaan dan perijinan	1,510,371,493.00	39 Unit	39 Unit	1,661,408,642.30	39 Unit	1,827,549,506.53	39 Unit	2,010,304,457.18	Sekretariat
				5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	843,848,936.00	39 Unit	39 Unit	928,233,829.60	39 Unit	1,021,057,212.56	39 Unit	1,123,162,933.82	
				5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	666,522,557.00	1 Paket	1 Paket	733,174,812.70	1 Paket	806,492,293.97	1 Paket	887,141,523.37	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							DPD/Bidang Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP dan Tepat Waktu	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terbina dan Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	242,485,682,956.00	100%	100%	327,694,825,826.90	100%	335,072,427,640.21	100%	343,410,314,136.23	
		Peningkatan Efektivitas Penganggaran Daerah	Persentase Cakupan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	1,866,767,351.00	100%	100%	1,903,444,086.10	100%	1,923,983,307.56	100%	2,116,381,638.32	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
				5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Tersusunnya KUA dan PPAS	135,895,012.00	2 Dokumen	2 Dokumen	149,484,513.20	2 Dokumen	164,432,964.52	2 Dokumen	180,876,260.97	
				5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	89,765,038.00	2 Dokumen	2 Dokumen	98,741,541.80	2 Dokumen	108,615,695.98	2 Dokumen	119,477,265.58	
				5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	21,126,923.00	48 Dokumen	48 Dokumen	23,239,615.30	48 Dokumen	25,563,576.83	48 Dokumen	28,119,934.51	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							DPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	423.670.300.00	2 Dokumen	2 Dokumen	466.037.330.00	2 Dokumen	512.641.063.00	2 Dokumen	563.905.169.30	
				5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	303.217.272.00	2 Dokumen	2 Dokumen	333.538.999.20	2 Dokumen	366.892.899.12	2 Dokumen	403.582.189.03	
				5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	893.092.806.00	20 Dokumen	20 Dokumen	832.402.086.60	20 Dokumen	745.837.108.11	20 Dokumen	820.420.818.92	
				5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAP dan Tepat Waktu	Terpenuhi ya Laporan Keuangan yang sesuai SAP dan Tepat Waktu	1,394,798,507.00	100 %	35 Laporan	1,384,278,357.70	35 Laporan	1,472,706,833.47	35 Laporan	1,619,976,812.82	Bidang Perbendaharaan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							DPD/Bidang Penanggung Jawab
										2024		2025		2026		
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	590.121.771.00	1 Dokumen	1 Dokumen	549.133.948.10	1 Dokumen	554.047.342.912	1 Dokumen	609.452.077.20	
				5.02.02.2.02.03	Penyiapan, PelaksanaanPengendalian danPenerbitan Anggaran Kasdan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	175.872.263.00	1 Dokumen	1 Dokumen	193.459.489.30	1 Dokumen	212.805.438.23	1 Dokumen	234.085.982.05	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							DPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PRK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PRK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PRK)	265.661.422.00	1 Laporan	1 Laporan	292.227.564.20	1 Laporan	321.450.320.62	1 Laporan	353.595.352.68	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							DPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	55.598.949.00	1 Dokumen	1 Dokumen	61.158.843.90	1 Dokumen	67.274.728.29	1 Dokumen	74.002.201.12	
				5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	307.544.102.00	1 Orang	100%	338.298.512.20	100%	372.128.363.42	100%	409.341.199.76	
				5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	Tersedianya Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	1.367.765.290.00	100%	39 Laporan	1.500.272.047.70	39 Laporan	1.578.456.719.54	39 Laporan	1.736.302.391.49	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							OPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LD dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LD, dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LD, dan Beban	140.711.798.00	12 Dokumen	12 Dokumen	154.782.977.80	12 Dokumen	170.261.275.58	12 Dokumen	187.287.403.14	
				5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	446.416.505.00	12 Laporan	12 Laporan	491.058.155.50	12 Laporan	500.000.000.00	12 Laporan	550.000.000.00	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							DPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	315,436,828.00	4 Dokumen	4 Dokumen	346,980,510.80	4 Dokumen	350,000,000.00	4 Dokumen	385,000,000.00	
				5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	30,201,664.00	1 dokumen	1 dokumen	33,221,830.40	1 dokumen	36,544,013.44	1 dokumen	40,198,414.78	
				5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	298,874,705.00	1 dokumen	1 dokumen	324,492,404.20	1 dokumen	356,941,644.62	1 dokumen	392,635,809.08	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							DPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjwa ban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjwa ban Pemerintah Kabupaten/ Kota	136.123.790.00	2 Orang	100 Orang	149.736.169.00	100 Orang	164.709.785.90	100 Orang	181.180.764.49	
				5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penatausaha an Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Tersedianya Laporan Penatausaha an Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	237.488.946.924.00	100%	12 Laporan	322.652.685.963.00	12 Laporan	329.817.721.510.00	12 Laporan	337.630.137.393.00	PPKD
				5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	8.936.500.000.00	12 Laporan	12 Laporan	9.830.150.000.00	12 Laporan	9.830.150.000.50	12 Laporan	9.830.150.000.50	
				5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	214.053.754.200.00	12 Laporan	12 Laporan	257.873.973.966.60	12 Laporan	265.039.009.512.60	12 Laporan	272.851.425.395.60	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							DPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000.00	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000.000.00	12 Laporan	50.000.000.000.00	12 Laporan	50.000.000.000.00	
				5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.498.692.724.00	12 Laporan	12 Laporan	4.948.561.996.40	12 Laporan	4.948.561.996.90	12 Laporan	4.948.561.996.90	
				5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	367.404.884.00	100 %	100 %	254.145.372.40	100 %	279.559.909.64	100 %	307.515.900.60	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
				5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	222.467.454.00	12 Dokumen	12 Dokumen	144.714.199.40	12 Dokumen	159.185.619.34	12 Dokumen	175.104.181.27	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							OPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	144,937,430.00	2 Orang	60 Orang	109,431,173.00	60 Orang	120,374,290.30	60 Orang	132,411,719.33	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi BMD	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah	1,165,961,681.00	100%	100%	1,132,557,849.10	100%	1,197,852,979.79	100%	1,317,638,277.77	
				5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang tercatat dalam Neraca Daerah	Persentase Aset yang tercatat dalam Neraca Daerah	1,165,961,681.00	100%	59 Dokumen	1,132,557,849.10	59 Dokumen	1,197,852,979.79	59 Dokumen	1,317,638,277.77	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
				5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Tersedianya Standar Harga	174,276,100.00	2 Dokumen	2 Dokumen	191,703,710.00	2 Dokumen	210,874,081.00	2 Dokumen	231,961,489.10	
				5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	337,607,906.00	2 Dokumen	2 Dokumen	221,368,696.60	2 Dokumen	243,505,566.26	2 Dokumen	267,356,122.89	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target							DPD/Bidang Penanggung Jawab
						Output	Outcome			2024		2025		2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	196,827,400.00	12 Laporan	12 Laporan	216,510,140.00	12 Laporan	238,161,154.00	12 Laporan	261,977,269.40	
				5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	354,585,160.00	2 Dokumen	2 Dokumen	390,043,676.00	2 Dokumen	381,087,389.38	2 Dokumen	419,196,128.32	
				5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	102,665,115.00	12 Laporan	12 Laporan	112,931,626.50	12 Laporan	124,224,789.15	12 Laporan	136,647,268.07	
								258,350,725,695.00			349,214,298,831.00		361,441,002,285.00		379,171,495,062.00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan merupakan suatu komitmen yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Realisasi)		Target			Kondisi Akhir
			2021	2022	2024	2025	2026	
1.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.	Persentase realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	90.05	80.07	92.87	93.70	94.22	
3.	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	14.16	13.7	7.00	6.50	6.00	

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir RPD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Nilai LAKIP	B	B	B	B	B
2.	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100
3.	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100
4.	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi BMD	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

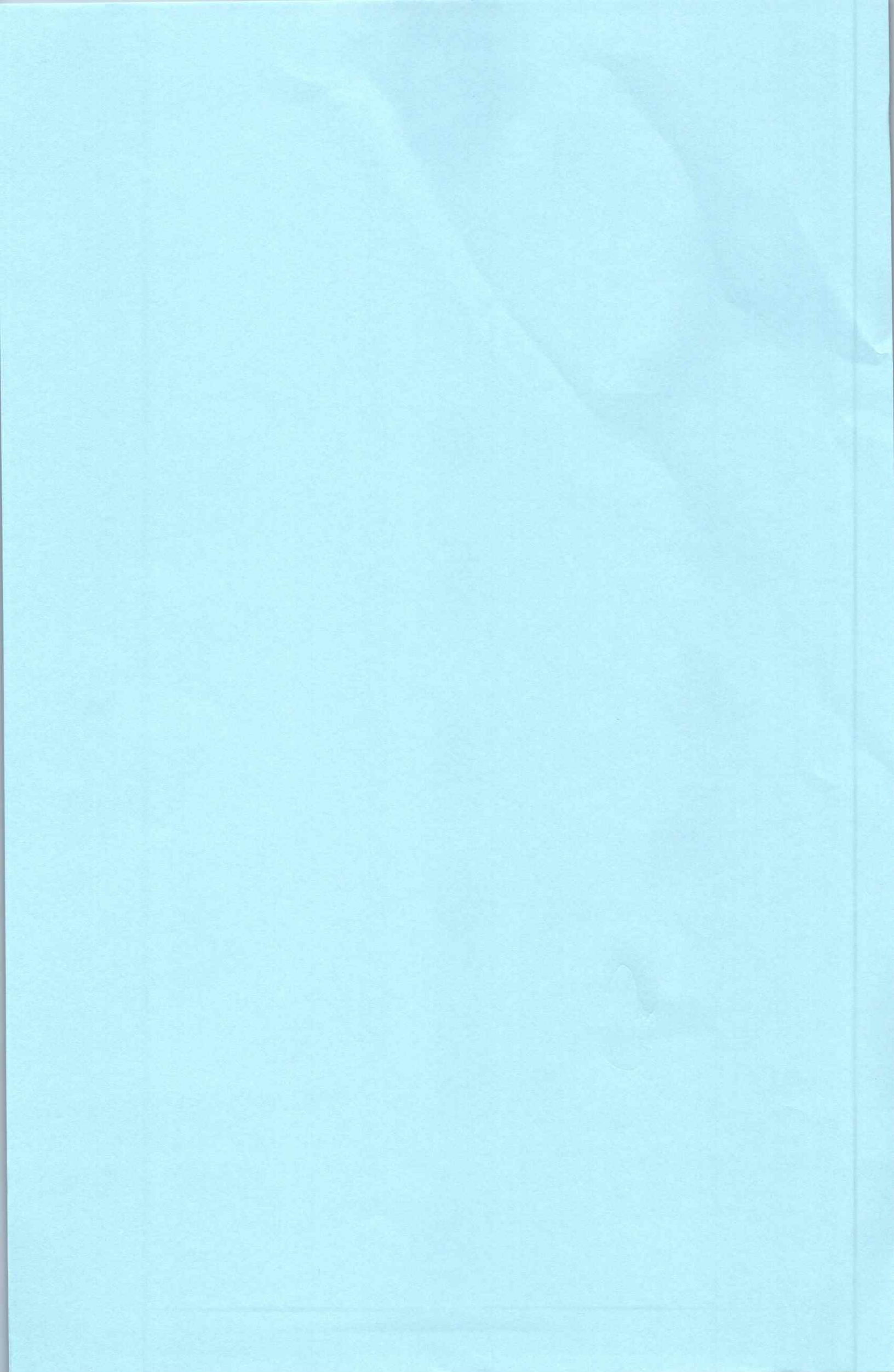
Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan,


TOTO JAYA, S.Pi
Pembina

NIP. 19720229 200604 1 008



TABEL T-C.27.B
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target						
						Output	Outcome			2024		2025		2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp
1		2		4	5					7	8	9	10	11	12
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK				WTP WTP WTP WTP										
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan BKAD	Persentase Cakupan Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan		WTP WTP WTP WTP										
				5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	Terselenggaranya Penunjang Urusan Kelembagaan BKAD	14,699,081,058.00	B	B	20,386,915,155.00	B	25,170,721,665.00	B	34,443,542,648.00
				5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	297,880,558.00	8 Dokumen	8 Dokumen	327,668,613.80	8 Dokumen	360,435,475.18	8 Dokumen	396,479,023.69
				5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74,025,619.00	2 Dokumen	2 Dokumen	81,428,180.90	2 Dokumen	89,570,998.99	2 Dokumen	98,528,098.89

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target	2024		2025		2026	
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	120,971,684.00	2 Dokumen	2 Dokumen	133,068,852.40	2 Dokumen	146,375,737.64	2 Dokumen	161,013,311.90
				5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102,883,255.00	3 Laporan	3 Laporan	113,171,580.50	3 Laporan	124,488,738.55	3 Laporan	136,937,612.90
				5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Tersusunnya Dokumen Laporan	7,429,878,288.00	2 Dokumen	2 Dokumen	8,384,539,908.00	2 Dokumen	14,123,828,893.30	2 Dokumen	22,582,960,598.14
				5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7,207,177,183.00	34 Orang	34 Orang	8,139,568,692.50	34 Orang	13,854,360,556.25	34 Orang	22,286,545,427.38
				5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55,638,172.00	1 Laporan	1 Laporan	61,201,989.20	1 Laporan	67,322,188.12	1 Laporan	74,054,406.93

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target	2024		2025		2026	
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	167,062,933.00	1 Laporan	1 Laporan	183,769,226.30	1 Laporan	202,146,148.93	1 Laporan	222,360,763.82
				5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan kompetensinya	Meningkatnya kompetensi sdm aparatur sesuai bidangnya	125,090,837.00	100%	100%	192,799,920.70	100%	151,359,912.77	100%	166,495,904.05
				5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	1 Paket	55,200,000.00	1 Paket	-	1 Paket	-
				5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125,090,837.00	25 Orang	25 Orang	137,599,920.70	25 Orang	151,359,912.77	25 Orang	166,495,904.05
				5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,851,158,754.00	12 Bulan	12 Bulan	3,136,274,629.40	12 Bulan	3,449,902,092.34	12 Bulan	3,794,892,301.57

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target	2024		2025		2026	
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	117,095,084.00	2 Paket	2 Paket	128,804,592.40	2 Paket	141,685,051.64	2 Paket	155,853,556.80
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	743,135,159.00	12 Paket	12 Paket	817,448,674.90	12 Paket	899,193,542.39	12 Paket	989,112,896.63
				5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	45,370,344.00	12 Paket	12 Paket	49,907,378.40	12 Paket	54,898,116.24	12 Paket	60,387,927.86
				5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	623,764,156.00	12 Paket	12 Paket	686,140,571.60	12 Paket	754,754,628.76	12 Paket	830,230,091.64
				5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	307,964,621.00	12 Paket	12 Paket	338,761,083.10	12 Paket	372,637,191.41	12 Paket	409,900,910.55
				5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96,629,390.00	12 Dokumen	12 Dokumen	106,292,329.00	12 Dokumen	116,921,561.90	12 Dokumen	128,613,718.09

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target						
						Output	Outcome			2024		2025		2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	917,200,000.00	12 Laporan	12 Laporan	1,008,920,000.00	12 Laporan	1,109,812,000.00	12 Laporan	1,220,793,200.00
				5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik	Tersedianya Penyediaan Barang Milik Daerah	956,678,128.00	2 Paket	2 Paket	5,003,398,140.80	2 Paket	3,408,737,954.88	2 Paket	3,458,611,750.37
				5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	544,498,000.00	1 Unit	1 Unit	4,550,000,000.00	1 Unit	2,910,000,000.00	1 Unit	2,910,000,000.00
				5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	412,180,128.00	1 Unit	1 Unit	453,398,140.80	1 Unit	498,737,954.88	1 Unit	548,611,750.37
				5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,528,023,000.00	12 Bulan	12 Bulan	1,680,825,300.00	12 Bulan	1,848,907,830.00	12 Bulan	2,033,798,613.00
				5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49,005,000.00	20 Laporan	20 Laporan	53,905,500.00	20 Laporan	59,296,050.00	20 Laporan	65,225,655.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target	2024		2025		2026	
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549,012,000.00	12 Laporan	12 Laporan	603,913,200.00	12 Laporan	664,304,520.00	12 Laporan	730,734,972.00
				5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177,821,600.00	12 Laporan	12 Laporan	195,603,760.00	12 Laporan	215,164,136.00	12 Laporan	236,680,549.60
				5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	752,184,400.00	55 Laporan	55 Laporan	827,402,840.00	55 Laporan	910,143,124.00	55 Laporan	1,001,157,436.40
				5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang memperoleh pemeliharaan dan perijinan	Tersedianya BMD yang memperoleh pemeliharaan dan perijinan	1,510,371,493.00	39 Unit	39 Unit	1,661,408,642.30	39 Unit	1,827,549,506.53	39 Unit	2,010,304,457.18
				5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	843,848,936.00	39 Unit	39 Unit	928,233,829.60	39 Unit	1,021,057,212.56	39 Unit	1,123,162,933.82

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target						
										2024		2025		2026	
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	666,522,557.00	1 Paket	1 Paket	733,174,812.70	1 Paket	806,492,293.97	1 Paket	887,141,523.37
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP dan Tepat Waktu	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terbina dan Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	242,485,682,956.00	100%	100%	327,694,825,826.90	100%	335,072,427,640.21	100%	343,410,314,136.23
		Peningkatan Efektivitas Penganggaran Daerah	Persentase Cakupan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	1,866,767,351.00	100%	100%	1,903,444,086.10	100%	1,923,983,307.56	100%	2,116,381,638.32
				5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Tersusunnya KUA dan PPAS	135,895,012.00	2 Dokumen	2 Dokumen	149,484,513.20	2 Dokumen	164,432,964.52	2 Dokumen	180,876,260.97
				5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	89,765,038.00	2 Dokumen	2 Dokumen	98,741,541.80	2 Dokumen	108,615,695.98	2 Dokumen	119,477,265.58
				5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	21,126,923.00	48 Dokumen	48 Dokumen	23,239,615.30	48 Dokumen	25,563,576.83	48 Dokumen	28,119,934.51

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target						
						Output	Outcome			2024		2025		2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	423,670,300.00	2 Dokumen	2 Dokumen	466,037,330.00	2 Dokumen	512,641,063.00	2 Dokumen	563,905,169.30
				5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	303,217,272.00	2 Dokumen	2 Dokumen	333,538,999.20	2 Dokumen	366,892,899.12	2 Dokumen	403,582,189.03
				5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	893,092,806.00	20 Dokumen	20 Dokumen	832,402,086.60	20 Dokumen	745,837,108.11	20 Dokumen	820,420,818.92
				5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAP dan Tepat Waktu	Terpenuhinya Laporan Keuangan yang sesuai SAP dan Tepat Waktu	1,394,798,507.00	100%	35 Laporan	1,384,278,357.70	35 Laporan	1,472,706,193.47	35 Laporan	1,619,976,812.82
				5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	590,121,771.00	1 Dokumen	1 Dokumen	549,133,948.10	1 Dokumen	554,047,342.91	1 Dokumen	609,452,077.20
				5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	175,872,263.00	1 Dokumen	1 Dokumen	193,459,489.30	1 Dokumen	212,805,438.23	1 Dokumen	234,085,982.05

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target						
										2024		2025		2026	
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	265,661,422.00	1 Laporan	1 Laporan	292,227,564.20	1 Laporan	321,450,320.62	1 Laporan	353,595,352.68

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target	2024		2025		2026	
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban SubKegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	55,598,949.00	1 Dokumen	1 Dokumen	61,158,843.90	1 Dokumen	67,274,728.29	1 Dokumen	74,002,201.12
				5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	307,544,102.00	1 Orang	100 Orang	288,298,512.20	100 Orang	317,128,363.42	100 Orang	348,841,199.76
				5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	Tersedianya Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	1,367,765,290.00	100%	39 Laporan	1,500,272,047.70	39 Laporan	1,578,456,719.54	39 Laporan	1,736,302,391.49

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target						
						Output	Outcome			2024		2025		2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	140,711,798.00	12 Dokumen	12 Dokumen	154,782,977.80	12 Dokumen	170,261,275.58	12 Dokumen	187,287,403.14
				5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	446,416,505.00	12 Laporan	12 Laporan	491,058,155.50	12 Laporan	500,000,000.00	12 Laporan	550,000,000.00
				5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	315,436,828.00	4 Dokumen	4 Dokumen	346,980,510.80	4 Dokumen	350,000,000.00	4 Dokumen	385,000,000.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target						
										2024		2025		2026	
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	30,201,664.00	1 dokumen	1 dokumen	33,221,830.40	1 dokumen	36,544,013.44	1 dokumen	40,198,414.78
				5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	298,874,705.00	1 dokumen	1 dokumen	324,492,404.20	1 dokumen	356,941,644.62	1 dokumen	392,635,809.08
				5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	136,123,790.00	2 Orang	100 Orang	149,736,169.00	100 Orang	164,709,785.90	100 Orang	181,180,764.49
				5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Tersedianya Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	237,488,946,924.00	100%	12 Laporan	322,652,685,963.00	12 Laporan	329,817,721,510.00	12 Laporan	337,630,137,393.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target						
										2024		2025		2026	
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	8,936,500,000.00	12 Laporan	12 Laporan	9,830,150,000.00	12 Laporan	9,830,150,000.50	12 Laporan	9,830,150,000.50
				5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	214,053,754,200.00	12 Laporan	12 Laporan	257,873,973,966.60	12 Laporan	265,039,009,512.60	12 Laporan	272,851,425,395.60
				5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	10,000,000,000.00	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000,000.00	12 Laporan	50,000,000,000.00	12 Laporan	50,000,000,000.00
				5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4,498,692,724.00	12 Laporan	12 Laporan	4,948,561,996.40	12 Laporan	4,948,561,996.90	12 Laporan	4,948,561,996.90

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target						
						Output	Outcome			2024		2025		2026	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Tersedianya sistem infomasi pengelolaan keuangan daerah	367,404,884.00	100%	100%	254,145,372.40	100%	279,559,909.64	100%	307,515,900.60
				5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	222,467,454.00	12 Dokumen	12 Dokumen	144,714,199.40	12 Dokumen	159,185,619.34	12 Dokumen	175,104,181.27
				5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	144,937,430.00	2 Orang	60 Orang	109,431,173.00	60 Orang	120,374,290.30	60 Orang	132,411,719.33
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah	1,165,961,681.00	100%	100%	1,132,557,849.10	100%	1,197,852,979.79	100%	1,317,638,277.77
				5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang tercatat dalam Neraca Daerah	Persentase Aset yang tercatat dalam Neraca Daerah	1,165,961,681.00	100%	59 Dokumen	1,132,557,849.10	59 Dokumen	1,197,852,979.79	59 Dokumen	1,317,638,277.77

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan		Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target	2024		2025		2026	
						Output	Outcome			target	Rp	target	Rp	target	Rp
				5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Tersedianya Standar Harga	174,276,100.00	2 Dokumen	2 Dokumen	191,703,710.00	2 Dokumen	210,874,081.00	2 Dokumen	231,961,489.10
				5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	337,607,906.00	2 Dokumen	2 Dokumen	221,368,696.60	2 Dokumen	243,505,566.26	2 Dokumen	267,856,122.89
				5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	196,827,400.00	12 Laporan	12 Laporan	216,510,140.00	12 Laporan	238,161,154.00	12 Laporan	261,977,269.40
				5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	354,585,160.00	2 Dokumen	2 Dokumen	390,043,676.00	2 Dokumen	381,087,389.38	2 Dokumen	419,196,128.32
				5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	102,665,115.00	12 Laporan	12 Laporan	112,931,626.50	12 Laporan	124,224,789.15	12 Laporan	136,647,268.07
								258,350,725,695.00			349,214,298,831.00		361,441,002,285.00		379,171,495,062.00

CASCADE RPD-RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2024-2026

RPD							RENSTRA PD														PERANGKAT DAERAH	
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET			TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET				
				2024	2025	2026				2024	2025	2026						2024	2025	2026		
	Tujuan:						Tujuan:															
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP								BKAD		
	Sasaran:						Sasaran:															
1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP	CC	CC	B	BB																
							1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BPKAD	Persentase Cakupan Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan	100	100	100	100	Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kapasitas kelembagaan	- Peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur - Peningkatan kapasitas kelembagaan	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip	B	B	B	B	Sekretariat	
																Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Sekretariat
																- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Sekretariat
																- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Sekretariat
																- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Sekretariat
																2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Sekretariat
																- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	34 Orang	34 Orang	34 Orang	Sekretariat

																		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Sekretariat
																		-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Sekretariat
																		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Sekretariat
																		-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	Sekretariat
																		-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Sekretariat
																		-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Sekretariat
																		-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Sekretariat
																		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Diperoleh Pemeliharaan dan Perizinan	39 Unit	39 Unit	39 Unit	39 Unit	Sekretariat
																		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	39 Unit	39 Unit	39 Unit	Sekretariat
																		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Sekretariat
																		II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah
																		3.	Peningkatan Efektivitas Penganggaran Daerah	Persentase Cakupan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
																		8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
																		-	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Murni yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
																		-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

																		-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
																		-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
																		-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
																		-	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
																		9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAP dan Tepat Waktu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Bidang Perbendaharaan Daerah
																		-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Perbendaharaan Daerah
																		-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Perbendaharaan Daerah
																		-	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Perbendaharaan Daerah
																		-	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah Laporan Aliran Kas dan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran perhitungan Pihak ke tiga	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Bidang Perbendaharaan Daerah
																		-	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Bidang Perbendaharaan Daerah
																		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase Laporan penatausahaan Keuangan Daerah Yang sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

